

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI
PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)**

Oleh:

WAHYU SYACHRIL RAMADHAN MUSA

NIM : 271 414 203

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I,

Pembimbing II,



HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum
Nip. 19690704 199802 2 001



Novendri. M. Nggilu, SH., MH
Nip. 19891127201404 1 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:

WAHYU SYACHRIL RAMADHAN MUSA

NIM : 271 414 203

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020

Pukul : 11.01 sd 12.05 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH

Nip. 19760208 200312 2 002

(..........)

2. Julius Mandjo, SH., MH

Nip. 19890702 201903 1 015

(..........)

3. HJ. Muthia CH. Thalib, SH., MH

Nip. 19690704 199802 2 001

(..........)

4. Novendri. M. Nggilu, SH., MH

Nip. 19891127201404 1 001


(..........)

Gorontalo, Agustus 2020

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo





Prof. Dr. Fenty U. Puiuhuiawa, SH., M.Hum.

NIP. 19680409 199303 2 001

A B S T R A K

**WAHYU SYACHRIL RAMADHAN MUSA NIM : (271414203) 2020.
“ANALISIS PELAKSANAAN HAK MUT’AH ISTRI PASCA
PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)”. Dibimbing
oleh masing-masing Pembimbing I : HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum dan
Pembimbing II : Novendri. M. Nggilu, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak mut’ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dan faktor-faktor apa yang menghambat hak mut’ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa eksistensi pelaksanaan hak mut’ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dimana hakim sering memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo dan sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon.

Bahwa factor faktor yang menghambat pelaksanaan hak mut’ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi, faktor menikah lagi, adanya faktor psikologis dan faktor mantan isteri mampu untuk biayai nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan mereka sebelumnya.

KATA KUNCI : PELAKSANAAN, MUT’AH ISTRI PASCA PERCERAIAN

ABSTRACT

MUSA, WAHYU SYACHRIL RAMADHAN. Student ID: (271414203) 2020.
“AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MUT’AH RIGHTS OF WIFE AFTER DIVORCE (A Case Study Conducted at the Religious Court of Gorontalo).” Principal Supervisor: HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum.
Co-supervisor: Novendri. M. Nggilu, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This empirical study aimed to determine and analyze the implementation and the inhibiting factors of the mut’ah (amenity payments) rights of wife after divorce at the Religious Court of Gorontalo.

The results showed that in the implementation of the mut’ah rights of wife after divorce in the aforementioned area, the judge often ordered the husband to provide a living for the ex-wife before the husband reads the divorce vow. It was motivated by the many submitted cases in the court and as a form of judge policy to protect the rights of the ex-wife. The amenity payments had no legal basis since it was made out of pity for the respondent, who was generally harmed by the applicant.

Further, the inhibiting factors of the implementation of the aforementioned rights in the research site included economic factors, remarriage factors, psychological factors, and factors that ex-wives were able to support their children financially from their previous marriages.

KEYWORDS: IMPLEMENTATION, THE MUT’AH RIGHTS OF WIFE AFTER DIVORCE

